

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai sekitar 81.000 km serta lebih dari 17.508 pulau dan luas laut sekitar 3,1 juta km² sehingga wilayah pesisir dan laut Indonesia dikenal sebagai Negara dengan kekayaan dan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia dengan memiliki ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang dan padang lamun.

Ekosistem wilayah pesisir yang sangat potensial dan produktif salah satunya yaitu ekosistem mangrove. Sebagai Negara yang terletak di wilayah tropis, Indonesia sangat potensial untuk tumbuh kembangnya ekosistem mangrove yang merupakan hutan khas daerah tropis dan subtropis. Hutan mangrove ditemukan hampir di seluruh kepulauan di Indonesia, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 tentang luas hutan mangrove di Indonesia.

Tabel 1.1
Luas Hutan Mangrove di Indonesia Tahun 2002

No	Wilayah	Luas (ha)	Persen
1	Bali	1.950	0,1
2	Irian Jaya	1.326.990	38
3	Jawa Tengah	18.700	0,5
4	Jawa Barat	8.200	0,2
5	Jawa Timur	6.900	0,2
6	Kalimantan Barat	194.300	5,6
7	Kalimantan Tengah	48.740	1,4
8	Kalimantan Timur	775.640	22,2
9	Kalimantan Selatan	120.780	3,5
10	Maluku	148.710	4,3
11	Nusa Tenggara	15.400	0,4
12	Sulawesi	256.800	7,4
13	Sumatera	570.000	16,3
	Jumlah	3.493.110	100

Sumber: FAO (2002) dalam Santoso (2008)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, menunjukan bahwa luas hutan mangrove di Indonesia pada tahun 2002 yaitu mencapai 3.493.110 Ha. Wilayah yang memiliki lahan yang paling luas yaitu Irian Jaya dengan luas lahan mangrove mencapai 1.326.990 Ha dan yang memiliki luas lahan mangrove paling sempit

Mira Rahmayanti, 2013

Pengaruh konversi lahan mangrove menjadi tambak terhadap kondisi social ekonomi di kecamatan cibuya kab karawang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yaitu wilayah Bali dengan luas lahan mangrove hanya sebesar 1.950 Ha. Sedangkan menurut Dahuri (2001:13), bahwa:

Hutan mangrove di Indonesia pada tahun 1982 yaitu 5.209.543 Ha, berkurang menjadi 3.235.700 Ha pada tahun 1987 dan menurun kembali menjadi 2.496.185 Ha pada tahun 1993. Diperkirakan 50% hutan mangrove di Indonesia rusak. Hutan mangrove mengalami deforestasi dengan kategori; 42% rusak berat, 29% rusak, < 23% baik dan 6% sangat baik. Menyempitnya luasan hutan mangrove salah satu penyebabnya yaitu pembukaan tambak udang secara massif sejak tahun 1980-an sebagai manifestasi revolusi biru. Luas tambak di pulau Jawa sampai tahun 1997 adalah 128.740 Ha di Jawa Barat, 50.330 Ha di Jawa Tengah 30.497 Ha, dan di Jawa Timur 47.913 Ha.

Menurut pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa luas lahan mangrove di Indonesia terus berkurang dari tahun ke tahun, padahal tingginya potensi ekonomi wilayah pesisir dapat menjadi faktor penarik dan pendorong untuk perkembangan wilayah.

Potensi ekonomi berasal dari berbagai pemanfaatan lahan di sekitar pesisir pantai seperti tambak, pertanian, industri, pemukiman, pelabuhan, pariwisata dan pertambangan. Masing-masing sektor berkembang dengan pesat sehingga menuntut perluasan lahan. Akibat dari tingginya kebutuhan lahan maka semakin tinggi pula lahan yang mengalami konversi dengan mengabaikan fungsi lahan, sehingga terjadi kerusakan pada lingkungan pesisir dengan kecenderungan semakin tinggi dan pada gilirannya akan merugikan masyarakat secara ekonomis dan ekologis.

Secara umum, rusaknya hutan mangrove terutama disebabkan oleh banyaknya budidaya tambak yang tidak memperhatikan jalur hijau (*green belt*) sehingga tingkat abrasi semakin tinggi. Hutan mangrove pada dasarnya berfungsi sebagai perlindungan pantai sekaligus sebagai penahan abrasi dan mempercepat pengendapan lumpur yang dibawa oleh air sungai disekitarnya (Adisasmita 2006: 55). Oleh karena itu hutan mangrove berperan penting terhadap lingkungan pesisir. Tingkat abrasi pada sebagian wilayah pesisir pantai Indonesia sangat tinggi sekitar 30.000 km garis pantai atau sekitar 40% dari 80.000 km bibir pantai rusak akibat abrasi. Tingginya tingkat abrasi akan berdampak sangat besar terhadap kondisi ekonomis dan ekologis apabila kurangnya pengelolaan lahan

sekitar wilayah pesisir. Adanya perkiraan bahwa sekitar 60% dari populasi penduduk Indonesia bermukim di pesisir dan 80% dari lokasi industri di Indonesia mengambil tempat di wilayah pesisir. (Opini Publik, 2003, dalam Laporan Kegiatan Pesisir Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi 2008).

Di Pulau Jawa terutama Jawa Barat terjadi perluasan lahan tambak secara besar-besaran ini mengakibatkan penyempitannya luas hutan mangrove. Dengan kata lain hutan mangrove di pulau Jawa dalam kurun waktu tertentu akan habis tereksploitasi. Luas dan kondisi hutan mangrove di Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Luas dan Kondisi Hutan Mangrove Di Jawa Barat

No	Kabupaten Pesisir	Kondisi Hutan Mangrove (Ha)					
		Luas	Baik	Sedang	Rusak	Rehabilitasi	Berubah Fungsi
1	Ciamis	237,58	97,08	60,75	79,75	2,00	29,99
2	Tasikmalaya	45,50	15,10	-	30,40	38,00	9,00
3	Garut	50,90	24,40	16,60	9,90	1,20	12,00
4	Cianjur	2,00	-	1,00	1,00	0,50	2,50
5	Sukabumi	6,50	0,30	1,60	4,30	0,30	2,10
6	Bekasi	12.354,00	3.570,00	5.205,00	3.579,00	69,00	-
7	Karawang	6.099,00	575,90	-	-	-	1.801,50
8	Subang	946,00	125,00	160,00	661,00	403,00	-
9	Indramayu	17.782,06	82,00	4.210,71	13,489,35	4.115,00	136,06
10	Cirebon	1.384,56	347,00	-	1.037,56	896,30	-
11	Kota Cirebon	20,00	10,00	-	10,00	5,00	-
	Jumlah	38.834,10	4.846,78	9.655,66	18.902,26	5.530,30	1.993,17

Sumber : Dikutip dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, 2008

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat diketahui kondisi mangrove di Jawa Barat yang rusak mencapai 18.902,26 Ha dan yang berubah fungsi yaitu seluas 1.993,17 Ha. Padahal keberadaan hutan mangrove ini sangat penting untuk wilayah pesisir, bahkan pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang untuk pelestarian lingkungan salah satunya terhadap kelestarian ekosistem hutan mangrove. Menurut undang-undang No. 5 tahun 1990 (dalam Arief A, 2003: 10), Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan suatu kekuatan dalam pelaksanaan konservasi kawasan hutan mangrove. Dalam undang-undang tersebut terdapat tiga aspek yang sangat penting, yaitu

1. Perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan dengan menjamin terpeliharanya proses ekologi bagi kelangsungan hidup biota dan keberadaan ekosistemnya
2. Pengawetan sumber plasma nutfah, yaitu menjamin terpeliharanya sumber genetik dan ekosistemnya, yang sesuai bagi kepentingan kehidupan umat manusia.
3. Pemanfaatan secara resmi atau berkelanjutan, baik berupa produksi dan jasa.

LPP Mangrove (2008) mengemukakan bahwa bentuk tekanan terhadap kawasan mangrove yang paling besar adalah pengalihfungsian (konversi) lahan mangrove menjadi tambak udang/ikan, sekaligus pemanfaatan kayunya untuk diperdagangkan. Selain itu tumbuhnya berbagai konflik akibat berbagai kepentingan antarlintas instansi sektoral maupun antar lintas wilayah administratif. Secara idealnya pemanfaatan kawasan mangrove harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat akan tetapi jangan sampai mengakibatkan kerusakan mangrove.

Pesisir pantai Karawang merupakan salah satu kawasan Pantai Utara di Jawa Barat yang mengalami konversi lahan mangrove menjadi tambak yang cukup besar sehingga mengakibatkan berkurangnya lahan mangrove yang cukup luas. Bersarnya konversi lahan mangrove dari tahun 2008 sampai tahun 2012 di Kabupaten Karawang dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Luas Hutan Mangrove Tahun 2008 - 2012

No	Kecamatan	Hutan Mangrove			
		2008		2012	
		Luas (Ha)	Persentase Tutupan Mangrove (Btg/Ha)	Luas (Ha)	Persentase Tutupan Mangrove (Btg/Ha)
1	Pakisjaya	80	10- 15	1.035,98	10-15
2	Batujaya	50	10- 15	1.463,8	10-15
3	Tirtajaya	515	10- 15	3.411,68	>10
4	Cibuaya	3.296	>15	1.583,47	5-10
5	Pedes	325	0-5	320	0-5
6	Cilebar	340	5- 10	326	5-10
7	Tempuran	700	0-5	512	0-5
8	Cilamaya Kulon	55	5-10	342	0-5
9	Cilamaya Wetan	738	>15	789	0-5
Jumlah		6.099		9.983,93	

Sumber: Dinas perikanan, Kelautan dan peternakan Kabupaten Karawang (Dalam Laporan Kegiatan Pesisir Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi 2008)

Berdasarkan Tabel 1.3 diketahui bahwa Kecamatan Cibuaya merupakan kecamatan yang mengalami perubahan luas mangrove tertinggi. Pada tahun 2008 luas lahan mangrove di Kecamatan Cibuaya mencapai 3.296 Ha dengan persentase tutupan lahannya <15 btg/Ha, sedangkan pada tahun 2012 luas lahannya berkurang lebih dari 50% menjadi 1.583,47 Ha dan persentase tutupan lahannya hanya 1-10 btg/Ha. Sedangkan kondisi mangrove pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.4.

Table 1.4
Potensi dan kondisi hutan mangrove di Kabupaten Karawang Tahun 2012

No	KECAMATAN	LUAS (Ha)	KONDISI (HA)		
			RUSAK	SEDANG	BAIK
1	Batujaya	1.463,80	428,25	991,41	44,14
2	Cibuaya	1.583,47	1.278,74	295,40	9,33
3	Cilamaya Kulon	342,00		92,00	250,00
4	Cilamaya Wetan	789,00		689,00	100,00
5	Cilebar	326,00		226,00	100,00
6	Pakisjaya	1.035,98	536,63	384,72	114,63
7	Pedes	520,00		520,00	-
8	Tempuran	512,00		512,00	-
9	Tirtajaya	3.411,68	3.156,69	243,43	11,56
	JUMLAH	9.983,93	5.400,31	3.953,96	629,66

Sumber : Profil Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang 2012

Berdasarkan Tabel 1.4, kondisi hutan mangrove di Kabupaten Karawang pada tahun 2012 yang mengalami kondisi rusak yaitu seluas 5.400,31 Ha, sedangkan yang berada pada kondisi sedang yaitu seluas 3.953,96 Ha dan yang memiliki kondisi yang baik hanya seluas 625,66 Ha. Kecamatan yang mengalami kerusakan paling tinggi yaitu Kecamatan Cibuaya dengan luas kerusakan lahan mangrove mencapai 1.278,74 Ha, luas lahan mangrove yang memiliki kondisi sedang yaitu seluas 295,40 Ha dan yang memiliki kondisi baik hanya seluas 9,33 Ha. Sedangkan besarnya perubahan luas area tambak, dapat dilihat pada tabel 1.5.

Berdasarkan data dari Tabel 1.5, dapat disimpulkan bahwa dari tahun ketahun lahan mangrove yang mengalami konversi lahan menjadi tambak semakin bertambah luasannya. Tingginya tingkat konversi lahan tersebut tentu akan menimbulkan dampak cukup tinggi, baik terhadap sosial ekonomi

masyarakat maupun lingkungan hidup. Konversi lahan mangrove menjadi tambak mengakibatkan tingginya kerusakan pantai akibat abrasi dan pesisir Karawang merupakan salah satu kawasan pantai utara yang mengalami laju abrasi.

Tabel 1.5

Perubahan luas area (Ha) tambak tahun 2008- 2012

No	Kecamatan	Luas area tambak (Ha) 2008	Luas area tambak (Ha) 2012
1	Pakisjaya	3.618,7	2.907,66
2	Batujaya	1.587,2	1.587,2
3	Tirtajaya	4.010,5	3.664
4	Cibuaya	1.193,00	2.795,19
5	Pedes	561	561
6	Cilebar	537	678,7
7	Tempuran	832,69	663
8	Cilamaya Kulon	79,9	79
9	Cilamaya Wetan	985	1.132,25

Sumber: Profil Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang 2012

Menurut BPLHD Jabar (2007), dengan abrasi yang terjadi pada pesisir laut maka secara langsung masyarakat mengalami dampak negatif, hal tersebut terjadi karena garis pantai Kecamatan Cibuaya yang terkena abrasi telah mundur antara 100- 500 meter ke arah daratan, sehingga mengakibatkan penyempitan luasan tambak, rumah penduduk dan jalan aspal sekitar pesisir rusak, menurunnya kualitas air tambak secara drastis sehingga menyebabkan kuantitas dan kualitas produksi tambak menurun akibatnya pertumbuhan perekonomian petani tambak juga menurun. Apabila konversi lahan terus dibiarkan banyak kemungkinan kerusakan akan sangat merugikan bagi penduduk sekitar khususnya dan umumnya penduduk karawang itu sendiri. Karena itu, harus ada sikap lebih lanjut agar dapat mengurangi kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh abrasi yang disebabkan rusaknya hutan mangrove dan konversi lahan mangrove menjadi tambak.

Berdasarkan masalah di atas penulis terinspirasi mengkaji konversi lahan mangrove menjadi tambak terhadap kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Karawang, khususnya di Kecamatan Cibuaya, dengan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Konversi Lahan Mangrove Menjadi Tambak Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Di Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola konversi lahan mangrove menjadi tambak di Kecamatan Cibuyaya?
2. Bagaimana pengaruh konversi lahan mangrove menjadi tambak terhadap kondisi sosial ekonomi petambak di Kecamatan Cibuyaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pola konversi lahan mangrove menjadi tambak di Kecamatan Cibuyaya.
2. Menganalisis pengaruh konversi lahan mangrove menjadi tambak terhadap kondisi sosial ekonomi di Kecamatan Cibuyaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini untuk menabahnya informasi dan wawasan dalam ilmu kegeografian khususnya lingkungan.
2. Bagi pemerintah, sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lahan.
3. Bagi masyarakat, memberikan informasi mengenai dampak konversi lahan mangrove menjadi tambak terhadap lingkungan sekitar.